

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM

Saepudin^{1*}, Cecep Wahyudin²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor Jawa Barat, Indonesia

E-mail: saepudin.muhtar@unida.ac.id, cecep.wahyudin@unida.ac.id

Abstrak: Kelangsungan hidup masyarakat pada setiap daerah merupakan bagian dari pembangunan pemerintahan, dengan adanya keluarga yang rentan secara finansial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maka pemerintah berkewajiban memberikan bantuan, bentuk bantuan yang di salurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Ciawi dengan mengadopsi dari empat bagan utama: komunikasi, sumber daya, organisasi, dan struktur birokrasi. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif dimana penulis menyebarkan pernyataan tersebut kepada 15 orang yang terdiri dari Masyarakat penerima dan pemberi bantuan selaku responden dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa program keluarga harapan yang ada di kecamatan ciawi sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden terhadap wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor serta hasil penyebaran angket menunjukkan nilai rata-rata dimensi 4,25. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Bogor menjaga nilai baik untuk tetap melaksanakan rencana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. Serta dapat digunakan sebagai masukan kepada penyelenggara PKH daerah Ciawi. Membenahi diri sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada penerima PKH karena ini akan membangun kepercayaan lebih di kalangan Masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaat program PKH.

Kata Kunci: *Bantuan Sosial, Implementasi, Kesejahteraan Masyarakat, Program PKH*

Abstract: *The survival of the community in each region is part of government development; with families who are financially vulnerable in meeting their basic needs, the government is obliged to assist in the form of assistance channeled through the Family Hope Program (PKH). This research aims to analyze the implementation of the Family Hope program in the Ciawi District by adopting four main plans: communication, resources, organization, and bureaucratic structure. The author used quantitative research methods, with a descriptive approach where the statement was distributed to 15 people from recipient communities and aid providers as respondents. Based on the research results, it was found that the Family Hope program in the Ciawi sub-district was running well. This can be seen from respondents' responses to interviews with the Bogor Regency Social Service and the results of distributing questionnaires showing an average dimension value of 4.25. So, based on these findings, the Bogor Regency Social Service maintains good values and continues to implement plans in accordance with the aims and objectives determined by law. And can be used as input to PKH organizers in the Ciawi area. Improving oneself is a form of responsibility to PKH recipients because this will build more trust in the community. In other words, this research impacts the welfare of the people who receive the benefits of the PKH program.*

Keywords: *Community Welfare, Implementation, PKH Program, Social Assistance*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan Negara Indonesia saat ini yang cukup sulit untuk di hilangkan adalah kemiskinan (Annisya & Novira, 2023). Kemiskinan ini menimbulkan masalah yang serius terhadap masyarakat, seperti munculnya masalah Kesehatan pada Masyarakat atau sulitnya Masyarakat untuk menuntut ilmu dikarenakan tidak adanya biaya. Permasalahan tersebut membuat pemerintah melalui dinas sosial bersama-sama membuat sebuah cetusan program untuk mengurangi kemiskinan tersebut. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat hidup sejahtera sesuai UU Kementerian Sosial Nomor 1 tahun 2008 (Pertiwi et al., 2019).

Program Keluarga Harapan adalah program yang sedang berjalan oleh Pusat Informasi Kesejahteraan Sosial untuk memberikan layanan sosial, termasuk informasi pengentasan kemiskinan, kepada keluarga miskin yang memilih untuk membangun rumah yang bermanfaat bagi masyarakat (Hasna et al., 2019). Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan keluarga yang memperoleh manfaat dari pendidikan, layanan kesehatan dan akses terhadap kesehatan (Lestari & Talkah, 2020). Dengan demikian, program PKH dapat dikatakan bahwa merupakan program yang penting dalam menghentikan kemiskinan serta dapat memberikan perlindungan sosial. Sejalan dengan hal tersebut banyaknya tantangan dalam penyaluran maupun dalam penggunaan bantuan tersebut sehingga masih kurangnya peahaan penerima manfaat dalam program PKH dan masih adanya kesenjangan dalam menjangkau seluruh masyarakat miskin (Nuraida, 2019). Selain itu, terdapat juga dampak positif dari adanya program PKH yang dapat dilihat dari adanya implementasi kebijakan PKH yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan (Islamiyah et al., 2021; Mardi & Rahman, 2022). Oleh karena itu, pemerintahan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui program PKH (Solong & Dzulqarnain, 2022).

Dengan adanya program PKH ini dapat menjadikan bantuan jangka pendek yang dapat memutus siklus kemiskinan dalam jangka Panjang (Marom et al., 2021). Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan program dapat tergantung pada sikap penerima manfaat dalam mendukung maupun menjadi penghambat dalam pelaksanaannya (Parawangi & Wahid, 2023). Adapun program PKH akan berdampak pada pengentasan kemiskinan sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga dan menjadi aspirasi bagi Pendidikan pada setiap daerah (Hartarto & Wardani, 2023; Mustari et al., 2019; Pramana et al., 2022). Dengan demikian, program PKH menjadi sangat penting diterapkan di setiap daerah secara merata dan sesuai dengan prasaratnya. Namun dalam proses implementasinya diperlukan keterlibatan aktif dari setiap kalangan sehingga program PKH dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah salah satu daerah penerima manfaat program ini yaitu masyarakat rumah tangga Kecamatan Ciawi yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang program PKH untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Ciawi berdasarkan adopsi teori George Edward III terdiri dari empat bagan utama: komunikasi, sumber daya, organisasi, dan struktur birokrasi (Rohimat et al., 2017; Setyawan et al., 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, penyebaran angket, studi pustaka dan wawancara dengan pengumpulan data primer ataupun data sekunder yang berhubungan dengan topik pada program PKH. Setelah data

terkumpul, dilakukan analisis secara deskriptif dengan analisa skala likert berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari 15 orang responden dengan Teknik pemilihan sampel secara penunjukan secara acak dan langsung kepada penerima manfaat dan penyelenggara program PKH. Adapun yang berhak menerima program PKH terdiri dari masyarakat penerima dan pemberi bantuan (Creswell, 2013; Najidah & Lestari, 2019; Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program PKH di Kecamatan Ciawi tentu tidak bisa dilaksanakan secara mandiri, namun perlu adanya dukungan dari pihak lain. Untuk memaksimalkan program tersebut supaya berjalan dengan efektif dan efisien maka dalam pelaksanaannya perlu adanya keterlibatan dari berbagai aktor, baik itu aktor pemerintah sebagai pelaksana program, aktor swasta sebagai pengawasan dalam program maupun aktor masyarakat sebagai penerima manfaat program (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022; Baharuddin & Saidang, 2020; Husen et al., 2017; Nerustia et al., 2015; Ridwanullah et al., 2019; Setyawan et al., 2021; Wahyudin, 2022; Wahyudin, Subagdja, et al., 2023).

Hasil dari penelitian yang dilakukan kepada penerima dan pemberi bantuan dengan 12 pertanyaan dalam kuesioner dengan landasan konsep model implementasi menurut Edward III dapat di karakteristik sebagai responden yang di jelaskan pada tabel-tabel.

Penjelasan mengenai dimensi komunikasi dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Dimensi Komunikasi

Komunikasi	Rata-Rata	Ket
Adanya petugas PKH melaksanakan sosialisasi Program Keluarga Harapan	4,40	Sangat Baik
Kejelasan informasi program	4,30	Sangat Baik
Pemahaman penerima dalam mendapatkan informasi	4,20	Baik
Konsistem dalam memberikan informasi	4,30	Sangat Baik
Skor Rataan	4,30	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, dimensi komunikasi menunjukkan hasil yang sangat baik jika dibandingkan dengan rata-rata; rata-rata setiap item pernyataan untuk setiap indikator dimensi tersebut menerima nilai 4,30, dengan kategoori yang sangat baik yang meliputi komunikasi antara pegawai dan penerima PKH dilaksanakan dengan sangat baik. Karena ini akan terjadi adanya pendamping Sosial/SDM PKH berkoordinasi dan sosialisasi ke Tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa serta Masyarakat (Saragi et al., 2021). Kemudian hal lainnya adalah adanya Pendamping Sosial/SDM PKH yang melaporkan kegiatan harian melalui aplikasi khusus e-SDM langsung ke pusat/kementrian sosial serta melaporkan juga kegiatan perbulan kepada Dinas Sosial Kabupaten melalui koordinator SDM PKH Kabupaten.

Adapun nilai terendah berada pada indikator pemahaman penerima dalam mendapatkan informasi dengan skor nilai 4,20 kategori baik, sedangkan indikator tertinggi berada pada indikator Adanya petugas PKH melaksanakan sosialisasi Program Keluarga Harapan dengan skor 4,40. Dalam artian, walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi terhadap program PKH namun tingkat pemahaman

masyarakat masih rendah, salah satu faktor penyebabnya seperti rendahnya tingkat Pendidikan.

Dengan demikian, pada dimensi komunikasi perlu adanya konsistensi komunikasi antara stakeholder yang saling berkepentingan antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan harus berdasarkan pada konsistensi sosialisasi yang dilakukan dalam penyampaian program, informasi yang jelas dan mudah difahami oleh masyarakat, sehingga dengan adanya konsistensi sosialisasi yang dilakukan disertai dengan kejelasan penyampaian program yang dapat memudahkan masyarakat memahami program dapat membuat pemberi manfaat maupun penerima manfaat program PKH dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Anisti et al., 2022; Cellyana Nainggolan et al., 2022; Fitriah et al., 2022; Howes et al., 2015; Jones et al., 2017; Podungge & Aneta, 2020; Prawira et al., 2021; Putri Paradiba et al., 2023; Roque & Raposo, 2016; Wu et al., 2018).

Penjelasan mengenai dimensi sumber daya dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2
Dimensi Sumber Daya

Sumberdaya	Rata-Rata	Ket
Jumlah pendamping PKH memadai dalam melaksanakan program	4,20	Sangat Baik
Kemampuan yang dimiliki petugas PKH dalam melaksanakan tugas	4,35	Sangat Baik
Kewenangan yang dialankan oleh petugas PKH	4,25	Sangat Baik
Tersedianya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH	4,10	Baik
Skor Rataan	4,23	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan di atas, dimensi sumber daya menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata setiap item pernyataan atau indikator pada dimensi tersebut senilai 4,23, yang mencakup kemampuan pegawai dalam memberikan penjelasan terhadap masyarakat. kegiatan ini tercapai karena adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial PKH. Contoh peran Pendamping Sosial PKH adalah mengadakan bakti sosial PKH, menyelenggarakan pertemuan pendahuluan dan pendokumentasian calon KPM PKH, memverifikasi komitmen anggota KPM PKH untuk hadir di sekolah dan pelayanan kesehatan tepat waktu, dan lain-lain (Agus et al., 2013).

Adapun nilai terendah berada pada indikator tersedianya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH dengan score 4,10 kategori baik, sedangkan indikator tertingginya berada pada indikator kemampuan yang dimiliki petugas PKH dalam melaksanakan tugas dengan score 4,35 kategori sangat baik. Dalam artian, petugas sudah memahami secara jelas mengenai tupoksi dalam pelaksanaan program namun masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, sumber daya menjadi peran penting dalam keberhasilan suatu program, karena pada dasarnya sumberdaya menjadi unsur utama sebagai faktor pendukung suatu program. Dalam program PKH ini, sumberdaya sebagai penggerak program tentu harus unggul dalam sumber daya manusia yang berperan sebagai pendamping, sehingga SDM sebagai pelaksana program dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena mempunyai kemamuan maupun pemahaman yang baik dalam program PKH yang akan berdampak pada suatu kewenangan dalam menjalankan program PKH, kewenangan tersebut dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat program PKH.

Oleh karena itu dalam penyaluran program PKH perlu adanya kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung tingkat kenyamanan dan keamanan masyarakat (Hutagalung, 2022; Kusnia, 2019; Magdalena et al., 2021; Marihot Tua Efendi Hariadja, 2012; Pratidina et al., 2022; Tsauri, 2013).

Penjelasan mengenai dimensi disposisi dapat dilihat pada tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3
Dimensi Disposisi

Disposisi	Rata-Rata	Ket
Sikap petugas PKH dalam membantu dan mempermudah saat pelaksanaan program	4,30	Sangat Baik
Kesediaan petugas PKH dalam menerima dan melaksanakan program tanpa paksaan	4,20	Baik
Skor Rataan	4,25	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Sebagaimana pada table di atas maka disimpulkan seluruh hasil untuk dimensi disposisi berarti skornya menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga dari rata-rata—rata-rata setiap item pernyataan/indikator pada dimensi tersebut menerima skor 4,25, yang menunjukkan bahwa petugas memiliki sikap yang baik terhadap penerima. Jika dilihat dari hasil tersebut hasil ini bisa didapatkan karena adanya intruksi atau perintah dari atas ke bawah dengan baik. Seperti SDM PKH/Pendamping sosial PKH melaksanakan kegiatan atau menerapkan kebijakan secara santun integritas dan professional serta memiliki kompetensi yang dapat di akui atau memiliki sertifikasi (Virgoreta et al., 2015).

Adapun nilai terendah berada pada indikator kesediaan petugas PKH dalam menerima dan melaksanakan program tanpa paksaan dengan skor 4,20 kategori baik, sedangkan indikator tertingginya berada pada indikator sikap petugas PKH dalam membantu dan mempermudah saat pelaksanaan program dengan skor 4,30 kategori sangat baik. Dalam artian, petugas sudah melaksanakan program sesuai dengan tupoksi yang diberikan namun masih terdapatnya beberapa petugas yang melaksanakan program harus disertai dengan intruksi yang sangat jelas dan masih kurangnya petugas melaksanakan program pelayanan penyaluran secara inisiatif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana program sehingga penerima manfaat program merasa nyaman, aman dan tentram.

Dengan demikian, disposisi menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan suatu program. Dalam program PKH, disposisi dapat berperan menjadi pembantu dalam kemudahan pelaksanaan program sehingga petugas dapat bersedia melaksanakan tugas tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, disposisi harus di dukung dengan adanya keterlibatan dari setiap pimpinan dan dilakukan dengan kerjasama yang baik sehingga dapat terciptanya koordinasi yang sangat baik dalam pelaksanaan program PKH (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022; Brown et al., 2021; Graci, 2016; Hidayanti & Efendi, 2020; Kedasi Silayar, Ika Sartika, 2021; Klumpp, 2018; McComb et al., 2017; Norsanti, 2021; Nosratabadi et al., 2019; Pereira et al., 2017; Randhawa et al., 2017; Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022; Siagian, 2020; Su et al., 2018; Sullivan & Skelcher, 2017; Ulibarri, 2015; Wahyudin, Apriliani, et al., 2023; Wondirad et al., 2020).

Penjelasan mengenai dimensi struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
 Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi	Rata-Rata	Ket
Petugas melaksanakan kegiatannya sesuai SOP	4,15	Sangat Baik
Tanggung jawab yang dijalankan petugas PKH sesuai dengan bidang dan tugasnya	4,30	Sangat Baik
Skor Rataan	4,23	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil kuesioner, dimensi struktur birokrasi rata-rata menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata setiap item pernyataan atau indikator pada dimensi tersebut senilai 4,23, yang menunjukkan bahwa ada kesesuaian dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) saat ini. Salah satu komponen yang paling efektif untuk membantu masyarakat adalah contoh yang baik (Suleman, 2017). Contoh struktur Dinas Sosial Kabupaten Bogor saat ini adalah Direktur Keselamatan dan Keamanan, Wakil Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Koordinator Kedeputian dan Pendamping Sosial PKH.

Adapun nilai terendah berada pada indikator petugas PKK melaksanakan kegiatannya sesuai SOP dengan skor nilai 4,15 kategori baik, sedangkan indikator tertingginya berada pada indikator tanggung jawab yang dijalankan petugas PKH sesuai dengan bidang dan tugasnya. Dalam artian, masih belum menyeluruh petugas PKH melaksanakan program disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan demikian, struktur organisasi menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelaksanaan program PKH, karena struktur organisasi menjadi acuan dalam struktur kerja pelaksanaan program. Dalam struktur organisasi dapat mengatur suatu standar penyelenggaraan program sehingga

program yang akan dijalankan sudah sesuai dengan kriteria perencanaan yang dapat memudahkan pencapaian program. Selain itu, struktur organisasi juga menjadi salah satu pembagian tugas tanggung jawab yang di bebaskan dalam pelaksanaan program. Dengan adanya pembagian tugas kinerja maka suatu program akan ringan untuk dilaksanakan yang dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan program. Dalam program PKH tentu sudah dilaksanakannya tolak ukur pembagian beban kerja sehingga setiap orangnya mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam menentukan keberhasilan program yang di dukung dengan standar operasional prosedur yang telah di tetapkan. Oleh karena itu, struktur organisasi mempunyai penaruh yang besar dalam keberhasilan suatu program (Ahyaruddin & Amrillah, 2018; Ikhsan et al., 2020; Kedasi Silayar, Ika Sartika, 2021; Lubis, 2016; Vikalista et al., 2021; Zahra Sholehah et al., 2023).

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan dapat dirangkum seluruh data pada kuesioner penerima program keluarga harapan diatas yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
 Rekapitulasi Implementasi Program Keluarga Harapan

Dimensi	Rata-Rata	Ket
Komunikasi	4,30	Sangat Baik
Sumber Daya	4,23	Sangat Baik
Disposisi	4,25	Sangat Baik
Struktur Birokrasi	4,23	Sangat Baik
Skor Rataan	4,25	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian Diolah 2023

Berdasarkan hasil rata-rata perhitungan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciawi diperoleh angka tertinggi 4,30 ada standar yang sangat baik dalam dimensi

komunikasi. Adapun kriteria penafsiran terendah yaitu pada dimensi sumber daya dan Struktur Birokrasi dan ketanggapan dengan nilai 4,23. Adapun hasil rekapitulasi penilaian keseluruhan dimensi yaitu rata-rata 4,25 dengan kriteria Sangat Baik.

SIMPULAN

Program keluarga harapan yang ada di kecamatan ciawi sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan rata-rata jawaban pada setiap dimensi mencapai skor 4,25 dengan kategori sangat baik. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Bogor diharapkan menjaga nilai baik tersebut. Untuk tetap melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. Sebab jika rencana ini tidak diberikan, maka akan menyebabkan sebagian politisi terus mengalami kemiskinan karena terus menerus mendapat bantuan dari negara. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan kepada penyelenggara PKH daerah Ciawi. Membenahi diri sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada penerima PKH karena ini akan membangun kepercayaan lebih di kalangan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., Purwanto, Sumartono, & M.Makmur. (2013). Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan. *Wacana*, 16(2), 79–96.
- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471–486. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9028>
- Anisti, Sidharta, V., Liliyana, & Syatir. (2022). Peran Komunikasi Pembangunan Dan Sistem Informasi Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 199–208.
- Annisya, N. M. O., & Novira, A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1), 29. <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Baharuddin, B., & Saidang, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN No. 39 Cakke. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 189–204. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i2.717>
- Brown, P., Daniels, C. Von, Bocken, N. M. P., & ... (2021). A process model for collaboration in circular oriented innovation. In *Journal of Cleaner ...*. Elsevier.
- Cellyana Nainggolan, A., Stiawati, T., & Cadith, J. (2022). Implementasi Program Sembako. *Jurnal Governansi*, 8(1), 39–48. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5627>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriah, M., Pratidina, G., Encep, M., Hasbiyah, D., Ruhimat, Apriliyani, N. V., Wahyudin, C., Agustini, Khaira, M., Ramadhan, D. A., Sakinah, S., Fadilah, A., Agustiani, T., & Ramadhan, R. N. (2022). *Peningkatan Pengetahuan Dan keterampilan Pemanfaatan Media Sosial Untuk Branding Desa Wisata*. 8(2), 1–7.

- Graci, S. (2016). Collaboration and partnership development for sustainable tourism. ... *Tropical Coastal and Island Tourism Development*.
<https://doi.org/10.4324/9781315761572-3>
- Hartarto, R. B., & Wardani, D. T. K. (2023). Does conditional cash transfer change educational aspirations? Evidence from Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 50(1), 148–161.
- Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2019). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108–116.
- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2020). *Praktik Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah*. 2(1), 34–40.
- Howes, M., Tangney, P., Reis, K., & ... (2015). Towards networked governance: improving interagency communication and collaboration for disaster risk management and climate change adaptation in Australia. *Journal of ...*
<https://doi.org/10.1080/09640568.2014.891974>
- Husen, S., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata Taman Nasional Betung Kerihun Dan Danau Sentarum (Tnbkds) Kalimantan Barat. *Jurnal Governansi*, 3(2), 81–98.
<https://doi.org/10.30997/jgs.v3i2.942>
- Hutagalung, B. A. (2022). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai: Kompetensi, Motivasi Dan Lingkungan Kerja (Penelitian Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 201–210.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.866>
- Ikhsan, K., Samin, R., Akhyary, E., Negara, I. A., Maritim, U., Ali, R., Publik, M. P., Ahead, T., Again, T., & Across, T. (2020). Implementasi Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(e-ISSN 2614-2945), 385–401.
- Islamiyah, R., Haning, M. T., & Hidayat, A. R. (2021). Adaptive Policies in the Family Hope Program (PKH) to achieve Sustainable Development Goals in Pangkep Regency. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 81–97.
<https://doi.org/10.31947/jakpp.v7i2.13971>
- Jones, P., Wynn, M., Hillier, D., & Comfort, D. (2017). The sustainable development goals and information and communication technologies. ... *Journal of Sustainability* ...
- Kedasi Silayar, Ika Sartika, D. M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 859–874.
- Klumpp, M. (2018). Automation and artificial intelligence in business logistics systems: human reactions and collaboration requirements. *International Journal of Logistics Research and ...*
<https://doi.org/10.1080/13675567.2017.1384451>
- Kusnia, N. (2019). Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan pendidikan Inklusi di SDN Betet 1 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1).
- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 229–241.
- Lubis, E. N. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD Se

- Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(2), 149–160.
- Magdalena, M., Echdar, S., & Sjarlis, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*, 1(1), 23–32.
- Mardi, M., & Rahman, A. (2022). The Implementation of the Family Hope Program in Alleviating Poverty in Lamurukung Village Tellusiatenge District Bone Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 9(2), 553. <https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.40974>
- Marihot Tua Efendi Hariadja. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Grafindo.
- Marom, K., Tamamudin, T., & Adinugraha, H. H. (2021). Hope Family Program for Muslim Society Welfare: Evidance From Hope Family West Pekalongan Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 54–69. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1137>
- McComb, E. J., Boyd, S., & Boluk, K. (2017). Stakeholder collaboration: A means to the success of rural tourism destinations? A critical evaluation of the existence of stakeholder collaboration within the Mournes *Tourism and Hospitality* <https://doi.org/10.1177/1467358415583738>
- Mustari, N., Hakim, L., Erni, E., & Puspaningrum, M. (2019). Policy Influence of Family Hope Program to Reduce the Poverty in Takalar, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 152–161. <https://doi.org/10.26618/ojip.v9i2.2449>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nerustia, A. N., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Konservasi Dan Pariwisata Management Policy Implementation of Spatial Region Conservation and Tourism. *Jurnal GOVERNANSI*, 1(1), 45–54.
- Norsanti. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Nosratabadi, S., Mosavi, A., Shamshirband, S., & ... (2019). Sustainable business models: A review. *Sustainability*.
- Nuraida, N. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 148–165.
- Parawangi, A., & Wahid, N. (2023). Journal of Local Government Issues (LOGOS) Poverty Alleviation in the Hope Family Program in Makassar. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 49–62.
- Pereira, G. V., Cunha, M. A., & ... (2017). Increasing collaboration and participation in smart city governance: A cross-case analysis of smart city initiatives. ... *for Development*. <https://doi.org/10.1080/02681102.2017.1353946>
- Pertiwi, I. P., Fedinandus, F., & Limantara, A. D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *CAHAYAtech*,

- 8(2), 182.
<https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.46>
- Podungge, A. W., & Aneta, A. (2020). Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.55-65.2020>
- Pramana, D., Armayanti, N., & Gultom, R. D. (2022). Policy Impact Analysis of The Harapan Family Program to Improve a Poor Household Welfare in Pardomuan Village Onanrunggu District Samosir Regency. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 37–44. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i1.17846>
- Pratidina, G., Wahyudin, C., Apriliyani, N. V., & Amalia, N. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Desa Wisata. *Jurnal Qardhul Hasan*, 8(2), 34–41.
- Prawira, N. G., Johari, A., & ... (2021). ... Learning Model to Improve the Quality of Visual Communication Design Learning Through the Collaborative Program of Design Development and Branding Tourist *on Arts and Design*
- Putri Paradiba, N., Salwa Maulidina, S., Eka Ismawanto, D., Hendrika Putri, S., Wiratama, G., Afrianti, N., Midriyan, A., Aprianto, F., Wahyudin, C., & Salbiah, E. (2023). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1959–1966.
- Randhawa, K., Jossierand, E., Schweitzer, J., & ... (2017). Knowledge collaboration between organizations and online communities: the role of open innovation intermediaries. *Journal of Knowledge* <https://doi.org/10.1108/JKM-09-2016-0423>
- Ridwanullah, M., Ayu, A., Wahyudin, C., Tri, D., Lira, I., & Goris, G. (2019). *Implementation of E-Governance to Improve the Civil Administration Service Quality in Public Sector*. 4531, 168–178.
- Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). Public Partisipation On Implementation Of KOTAKU/PNPM Program In Ciawi Bogor Municipality. *Jurnal Governansi*, 3(2), 71–80.
- Roque, V., & Raposo, R. (2016). Social media as a communication and marketing tool in tourism: an analysis of online activities from international key player DMO. *Anatolia*. <https://doi.org/10.1080/13032917.2015.1083209>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Siagian, F. (2020). Pengaruh Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai di Akademi Maritim Cirebon. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 20–26. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1275>
- Solong, A., & Dzulqarnain, D. (2022). The Effectiveness of the Implementation of the Hope Family Program in Poverty Reduction in Indonesia. *International Journal of Social Science Research*

- and Review*, 5(7), 295–302. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.382>
- Su, L., Huang, S., & Huang, J. (2018). Effects of destination social responsibility and tourism impacts on residents' support for tourism and perceived quality of life. *Journal of Hospitality & Tourism* <https://doi.org/10.1177/1096348016671395>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sullivan, H., & Skelcher, C. (2017). *Working across boundaries: Collaboration in public services*. books.google.com.
- Tsauri, S. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Journal of Modern African Studies* (Vol. 35, Issue 17).
- Ulibarri, N. (2015). Collaboration in federal hydropower licensing: Impacts on process, outputs, and outcomes. *Public Performance & Management Review*. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031004>
- Vikalista, E., Ratih Rapisa, D., & Putri, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 6(3), 1–12.
- Virgoreta, T. D. A., Nur Pratiwi, R., & Suwondo. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurusan Administrasi Publik*, 2, No. 12, 1–6.
- Wahyudin, C. (2022). Implementation Of Online Annual Motor Vehicle Tax Payment Services In The Cibadak Samsat Area ., *Journal of Multidisciplinary Science*, 1(2), 64–70.
- Wahyudin, C., Apriliani, A., Ramdani, F. T., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2023). a Bibliometric Analysis Collaborative Governance of Plastic Reduction Through the Transformation Industry. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(4), 85–93.
- Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>
- Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*.
- Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., & ... (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. ... *Surveys & Tutorials*.
- Zahra Sholehah, A., Zoe Susanto, C., Qotrunada, R., Wahyudin, C., Salbiah, E., & Studi Administrasi Publik, P. (2023). Peran Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Karimah Tauhid*, 2(1), 352–359.